BAB II

SENJATA TAJAM KUJANG, TINDAK PIDANA DAN PROSES PIDANA

A. Pengertian Senjata Tajam Kujang

1. Pengertian Senjata Tajam

Menurut Wikipedia:¹

“Senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau lebih kompleks seperti peluru kendali balistik”.

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002

Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

“Senjata tajam adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib”.

Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

menjelaskan bahwa:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*),

WIB ¹<https://id.wikipedia.org/wiki/Senjata> Diakses pada tanggal 4 Desember 2018 Pukul 10.00

dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.

- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Dalam prakteknya biasa diterapkan bahwa dalam melakukan pembunuhan atau penganiayaan maka diterapkan undangundang ini untuk senjata yang dipakai tanpa memperhatikan penafsiran-penafsiran karena nyata senjata itu telah dipakai (jadi telah bertujuan) menjadi senjata.

Di Indonesia terdiri dari banyak provinsi yang memiliki senjata tradisional yang menjadi ciri khasnya. Berikut adalah senjata tradisional dari tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia:²

- a. Senjata tradisional Nangro Aceh Darusalam: Rencong.
- b. Senjata Tradisional Sumatra Utara: Piso Gaja Dompok.
- c. Senjata Tradisional Sumatera Barat: Karih, Ruduih, Piarit.
- d. Senjata Tradisional Provinsi Kepulauan Riau: Jenawi.
- e. Senjata Tradisisional Provinsi Jambi: Badik Tumbuk Lada.
- f. Senjata Tradisional Provinsi Sumatera Selatan: Tombak Trisula.
- g. Senjata Tradisional Provinsi Lampung: Terapang, Pehduk Pay
- h. Senjata Tradisional Provinsi Bengkulu: Kuduk, Badik, Rudus.
- i. Senjata Tradisional Provinsi DKI Jakarta: Badik, Parang, Golok.
- j. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Barat: Kujang.
- k. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Tengah: Keris.
- l. Senjata Tradisional Provinsi DI Yogyakarta: Keris Jogja.

²<http://www.berbagaireviews.com/2015/03/gambar-dan-daftar-lengkap-nama-nama.html>
Diakses pada tanggal 4 Desember 2018 Pukul 10.00 WIB

- m. Senjata Tradisional Provinsi Jawa Timur : Clurit.
- n. Senjata Tradisional Provinsi Bali : Keris
- o. Senjata Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Barat: Keris, Sampari, Sondi.
- p. Senjata Tradisional Provinsi Nusa Tenggara Timur: Sundu.
- q. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Tengah: Mandau, Lunjuk Sumpit Randu.
- r. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Selatan: Keris, Bujak Beliung.
- s. Senjata Tradisional Provinsi Kalimantan Timur: Mandau.
- t. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Utara: Keris, Peda, Sabel. U
- u. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Tengah: Pasatimpo
- v. Senjata Tradisional Provinsi Sulawesi Selatan: Badik.
- w. Provinsi Sulawesi Barat - Senjata Tradisional :Tombak.
- x. Senjata Tradisional Provinsi Maluku: Parang Salawaki / Salawaku, Kalawai.
- y. Senjata Tradisional Provinsi Irian Jaya: Pisau Belati.
- z. Senjata Tradisional Provinsi Papua Barat: Busur dan Panah.

2. Pengertian Kujang

Menurut Wikipedia:³

Kujang dikenal sebagai benda tradisional masyarakat Jawa Barat (sunda) yang memiliki nilai sakral serta mempunyai kekuatan magis. Beberapa peneliti menyatakan bahwa istilah "kujang" berasal dari kata *kudihyang* (*kudi* dan *Hyang*. Kujang (juga) berasal dari kata Ujang, yang berarti manusia atau manusa. Manusia yang sakti sebagaimana Prabu Siliwangi.

Secara umum, kujang mempunyai pengertian sebagai pusaka yang mempunyai kekuatan tertentu yang berasal dari para dewa (=Hyang), dan sebagai sebuah senjata, sejak dahulu hingga saat ini Kujang menempati

³<https://id.wikipedia.org/wiki/Kujang> Diakses pada tanggal 4 Desember 2018 Pukul 10.00

satu posisi yang sangat khusus di kalangan masyarakat Jawa Barat (sunda). Sebagai lambang atau simbol dengan nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalamnya, kujang dipakai sebagai salah satu estetika dalam beberapa lambang organisasi serta pemerintahan. Disamping itu, kujang pun dipakai pula sebagai sebuah nama dari berbagai organisasi, kesatuan dan tentunya dipakai pula oleh Pemda Provinsi Jawa Barat.

Pada masa lalu kujang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sunda karena fungsinya sebagai peralatan pertanian. Dengan perkembangan kemajuan, teknologi, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat sunda, kujang pun mengalami perkembangan dan pergeseran bentuk, fungsi dan makna. Dari sebuah peralatan pertanian, kujang berkembang menjadi sebuah benda yang memiliki karakter tersendiri dan cenderung menjadi senjata yang bernilai simbolik dan sakral. Wujud baru kujang tersebut seperti yang kita kenal saat ini diperkirakan lahir antara abad 9 sampai abad 12”.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Andi Hamzah berpendapat bahwa:⁴

“Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat

⁴Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 22.

menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan”.

P.A.F Lamintang mengatakan:⁵

“Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar faith* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah, perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sesuatu dari sesuatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan kenyataan, Perbuatan atau tindakan”.

Moeljatno menterjemahkan:⁶

“Istilah *strafbaar faith* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

J. Bauman dalam Sudarto merumuskan :⁷

“Bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan dari kesalahan yang ada dalam setiap tindak pidana”.

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum atau perbuatan yang di larang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi

⁵P.A.F Laminating, *Op.cit*, hlm. 181.

⁶Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 59.

⁷Sudarto, *Op.cit*, hlm. 42.

pidanan yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menumbukan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, maka orang tersebut disebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana, dengan begitu, aturan atau larangan dan ancaman hubungan yang erat, sehingga antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat.

Beberapa pengertian dari para pakar hukum mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut:⁸

a. Van Hamel

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam web yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Pompe Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu :

⁸Tri Andarisma, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Sakti, Bandar Lampung, 2007, hlm. 16.

- a) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan dengan kesalahan si pelanggar, diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan.
- b) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan. Akan tetapi, sebelum itu mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan atas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Preavia Lege Poenali*).

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain hal dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang

maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain adalah sebagai berikut :⁹

a. Menurut kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran, bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

b. Menurut cara merumuskannya

⁹P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.* hlm. 16.

Tindak Pidana dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana (*Materiil Delicten*).

- a) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah perbuatan tertentu.
- b) Tindak pidana materil, inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

b. Menurut bentuk kesalahan

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*Dolus Delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*Culpose Delicten*).

c. Menurut macam perbuatannya:

- a) Tindak pidana aktif (*positive*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkan diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.
- b) Tindak pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja, serta tindak pidana aktif dan pasif.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalam segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Menurut P.A.F Lamintang unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:¹⁰

Unsur-unsur Subjektif:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP

¹⁰P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 193-194.

- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindakan pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif:

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrchttelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan segala sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yaitu tercermin pada bunyi rumusannya. Berbicara mengenai tindak pidana tidak hanya berbicara mengenai istilah atau pengertian tindak pidana saja, melainkan juga berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur tindak pidana yang di kemumkan oleh para pakar hukum yang terdapat beberapa perbedaan pandangan, baik dari pandangan atau aliran Monistis dari pandangan aliran Dualistis.

Aliran monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*crimical act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*). Aliran dualistis adalah pandangan

yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur pidana sebagai berikut:¹¹

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*Stafbaar feit*) adalah:¹²

- a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
- b. Diancam dengan pidana (*Strafbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningvatbaar person*).

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar feit*).

Unsur Objektif :

¹¹Andi Hamizah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 88.

¹²Sudarto, *Op.cit*, hlm. 40-42

- a. Perbuatan orang
- b. Akibat yang terlihat dari perbuatan itu
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat dimuka hukum.

Unsur Subjektif :

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab
- b. Adanya kesalahan. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:¹³

- a. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- b. Perbuatan itu berentangan dengan hukum.
- c. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
- d. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.
- e. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia.

Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, tindak pidana dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan

¹³Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

- b. Bersifat melawan hukum atau
- c. Bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

C. Proses Pidana

Asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana menurut Andi Hamzah:¹⁴

“Asas-asas penting yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang pertama-tama dikemukakan adalah asas legalitas dalam hukum acara pidana sebagai padanan asas legalitas dalam hukum pidana materiil. Berlainan dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil yang bertumpu pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya.” Dipakai istilah “perundang-undangan pidana”, ini berarti, suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang dalam arti formil, seperti Peraturan Pemerintah dan Perda dapat memuat rumusan delik dan sanksi pidana. Adapun dalam hukum acara pidana dipakai istilah undang-undang (*wet*), sehingga hanya dengan undang-undang suatu pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dapat dilakukan. Pasal 1 KUHP (Sv.) Netherland berbunyi: *Strafvordering heft alleen plaats op de wijze bij de wt voorzien*. (Hukum acara pidana dijalankan hanya berdasarkan cara yang ditentukan oleh undang-undang). Jadi tidak boleh peraturan yang lebih rendah dari undang-undang (dalam arti formil) memuat peraturan acara pidana. Cortens mengatakan, bahwa hukum pidana materiil bias bersifat local tetapi hukum acara pidana bersifat nasional”.

1. Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan¹⁵

Untuk menunjukkan system peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHAP memakai istilah “segera”. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) di dalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradila cepat, sederhana,

¹⁴Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 10.

¹⁵*Ibid*, hlm. 12.

dan biaya ringan yang dianut di dalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut.

Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Bergitu pula peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam undang-undang tersebut.

2. Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*)¹⁶

Asas ini disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga penjelasan umum butir 3c KUHAP berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

3. Asas Oportunitas¹⁷

Dalam hukum acara pidana dikenal suatu badan yang khusus diberi wewenang untuk melakukan penuntutan pidana ke pengadilan yang disebut penuntut umum. Di Indonesia penuntut umum itu disebut juga jaksa (Pasal 1 butir a dan b serta Pasal 137 dan seterusnya KUHAP).

Wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tiada badan lain yang boleh melakukan itu. Ini disebut *dominus litis* di tangan penuntut umum atau jaksa. *Dominus* berasal dari bahasa Latin, yang artinya pemilik. Hakim tidak dapat meminta supaya

¹⁶*Ibid*, hlm. 14.

¹⁷*Ibid*, hlm. 16.

delik diajukan kepadanya. Jadi, hakim hanya menunggu saja penuntutan dari penuntut umum.

4. Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum¹⁸

Pemeriksaan pengadilan berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan tidak terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut: “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua siding membuka siding dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak” ayat (3). “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum” ayat (4).

Untuk ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu sebagai berikut: “Jaminan yang diatur dalam ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas peradilan tersebut tidak dipenuhi”.

Yang menjadi masalah ialah karena sebenarnya masih ada kekecualian yang lain selain yang disebut diatas, yaitu delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum. Apabila hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum demi menjaga rahasia menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman hal tersebut diperbolehkan karena Pasal 19 yang mengatur hal tersebut tidak

¹⁸*Ibid*, hlm.20.

menyebut secara limitative pengecualian seperti KUHAP. Akan tetapi, dengan KUHAP ini hal seperti itu menjadikan putusan batal demi hukum.

Sebenarnya hakim dapat menetapkan apakah suatu sidang dinyatakan seluruhnya atau sebagiannya tertutup untuk umum. Pertimbangan tersebut seluruhnya diserahkan kepada hakim. Hakim melakukan itu berdasarkan jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa. Saksi pun dapat mengajukan permohonan agar sidang tertutup untuk umum dengan alasan semi nama baik keluarganya.

Walaupun sidang dinyatakan tertutup untuk umum, namun keputusan hakim dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Bahkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 dan KUHAP Pasal 195 tegas menyatakan bahwa: “Semua putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.

5. Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hakim¹⁹

Asas yang dianut di negara-negara yang berdasarkan hukum ini tegas tercantum pula dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan KUHAP dalam penjelasan umum butir 3a. Pasal 5 ayat (1) tersebut berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

6. Peradilan Dilakukan oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap²⁰

¹⁹*Ibid*, hlm. 22.

²⁰*Ibid*, hlm. 22.

Ini berarti pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan ini diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara. Ini disebutkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 31. Dalam sistem lain, yaitu sistem juri yang menentukan salah atau tidaknya terdakwa ialah suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat. Pada umumnya mereka adalah awam tentang ilmu hukum. System hakim tetap juga mengikuti system di Belanda yang dahulunya menganut system juri pula, tetapi pada tahun 1813 dihapuskan.

7. Tersangka/Terdakwa Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum²¹

Asas ini telah menjadi ketentuan universal di negara-negara demokrasi dan beradab. Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain:

- a. Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka/terdakwa ditangkap atau ditahan.
- b. Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu.
- d. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.

²¹*Ibid*, hlm. 23.

- e. Turunan berita cara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.
- f. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggaran-kelonggaran ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, social, dan ekonomis. Segi-segi yang disebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.

8. Asas Akusator dan Inkisitor (*Accusatoir dan Inquisitoir*)²²

kebebasan memberi dan mendapatkan penasihat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHAP telah dianut asas akusator itu. Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan siding pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan.

Asas Inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan, sama halnya dengan *Ned. Sv.* yang lama yaitu tahun 1838 yang direvisi tahun 1885.

Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti terpenting. Dalam pemeriksaan selalu pemeriksa berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka. Kadang-

²²*Ibid*, hlm. 24.

kadang untuk mencapai maksud tersebut pemeriksaan melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan.

Sesuai denda hak-hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal maka asas inkisitor ini telah ditinggalkan oleh banyak negeri beradab. Selaras dengan itu, berubah pula sistem pembuktian yang alat-alat bukti berupa pengakuan diganti dengan “keterangan terdakwa”, begitu pula penambahan alat bukti berupa keterangan ahli.

Untuk mengimbangi perubahan system pemeriksaan dan pembuktian ini maka para penegak hukum makin dituntut untuk agar menguasai segi-segi teknis hukum dan ilmu-ilmu pembantu untuk acara pidana, seperti kriminalistik, kriminologi, kedokteran forensic, antropologi, psikologi, dan lain-lain.

9. Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan²³

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi. Pemeriksaan hakim juga dilakukan secara lisan, artinya bukan tertulis antara hakim dan terdakwa. Ketentuan hal ini diatur dalam Pasal 154, 155 KUHAP, dan seterusnya.

Yang dipandang pengecualian dari asas langsung ialah kemungkinan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa, yaitu putusan verstek atau *in absentia*. Tetapi ini hanya merupakan pengecualian, yaitu

²³*Ibid*, hlm. 25.

dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan (Pasal 213 KUHAP).

KUHAP Berbunyi: “Terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang”. Begitu pula ketentuan dalam Pasal 214 yang mengatur acara pemeriksaan verstek itu.

Dalam proses pidana dilakukan upaya penegak hukum dalam hukum pidana yang tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab secara persial dari pihak dalam penanganannya sebagai suatu sistem.

Menurut Romli Atmasasmita:²⁴

“Definisi yang lain seperti dikemukakan Ramington Justice dan Ohlin, bahwa *crimical justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan system terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil intruksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengantung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara yang efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.

Pengertian tersebut memberi pemahaman bahwa sistem peradilan pidana merupakan proses interaksi secara terpadu antara peraturan perundang-undangan pidana, praktik administrasi yang dijalankan lembaga peradilan pidana dan pelaksanaannya.

Terkait dengan peradilan di atas, oleh Hagan seperti dikutip Romli Atmasasmita, membedakan pengertian antara *crimical justice system* dan *criminal justice process*. Menurut Hagan, *crimical justice process* adalah

²⁴Romli Atmasasmita, *Sistim Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm. 14.

setiap tahap dari suatu putusan yang dihadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. peradilan pidana sebagai proses menurut pengertian Hagan, didalamnya terdapat pentahapan penanganan oleh komponen-komponen terkait yang masing-masing memberikan suatu keputusan hingga ada penentuan status hukum bagi tersangka atau terdakwa.

Sedangkan peradilan pidanan sebagai sistem didalamnya terdapat keterkaitan hubungan keputusan yang dibuat setiap komponen terkait dalam prosesnya kearah suatu tujuan.

Peradilan Pidana di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga-lembaga peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan serta Lembaga Perasyarakatan (LP). Untuk memahami fungsi serta tugas dari masing-masing lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut maka, dibawah ini diuraikan fungsi serta tugas-tugas dari lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut.

Lembaga-lembaga peradilan diantaranya:²⁵

1. Kepolisian

Kepolisian memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas serta fungsi dari Kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu:

²⁵Mardjono Reksodipoetro, *Bahan Bacaan Wajib Matakuliah Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Dokumentasi Hukum UI, Jakarta, 1983, hlm. 82.

“Kepolisian adalah lembaga yang pertama kali harus dilewati dalam proses penegakan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian, penyidikan penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tersangka.”

2. Kejaksaan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

“Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

3. Pengadilan

Pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan landasan hukum sistem peradilan Negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan secara khusus, istilah pengadilan disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa:

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan baik membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Tugas untuk mengadili tersebut dilaksanakan oleh Hakim. Pengertian Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:
“Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang”.

Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah termasuk Hukum di Pengadilan Negeri, Hakim tinggi di Pengadilan Tinggi serta Hakim Agung di Mahkamah Agung.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani yang telah diputuskan oleh Pengadilan baginya. Masuknya terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan bagi terpidana baik pembinaan secara fisik maupun mental, dengan cara memberikan kepada terpidana-terpidana tersebut pendidikan sekolah, moral, agama, serta keterampilan khusus agar terpidana nantinya mempunyai bakat dalam menghadapi lingkungan hidup yang baru setelah para terpidana tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Lembaga-lembaga peradilan tersebut satu sama lain saling berhubungan dalam melakukan penanganan suatu perkara. Proses pekerjaannya peradilan pidana baru dapat terbentuk sebagai suatu proses yang sistematis apabila ada pemahaman yang sama diantara komponen peradilan pidana berpotensi akan terfragmentasi dan berjalan sendiri-

sendiri, sehingga akan menyebabkan penegakan hukum dengan menggunakan sistem ini tidak akan berhasil dengan baik.

Oleh Mardjono Reksodipoetro, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sebagai masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bermasalah dipidana.
- c. Mengusahaka agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.